

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KJP PLUS WILAYAH JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

Ikbal Rachmat, A.Rahman, Sumartono, Sahira Humaira
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta
ikbal.rachmat@esaunggul.ac.id

Abstract

Monitoring and Evaluation of KJP Plus is carried out as a Community Service (P2M) activity that is established between the Communication Sciences faculty of Esa Unggul University and the Provincial Government of DKI Jakarta, with the aim of conducting verification in the form of data deepening to various parties related to KJP Plus activities from the SD level, Junior high, high school, to the neighborhood where the student / i is concerned. Monitoring and evaluation activities are carried out using a qualitative approach using survey design with the aim of descriptive and non-participatory observation through interviews, with sampling techniques, stratified random sampling of KJP Plus populations in several areas of East Jakarta from each of the Stakeholders (authorized / related parties) namely as many as 6 people consisting of: students, homeroom teachers, school principals, KJP Plus operators, student guardians and RT. The results obtained that this distribution program has been right on target to the recipient, with a note in the form of no increase in achievement for recipient students, lack of special staff KJP Plus program for schools, the unavailability of scanners and the burden on schools with operational costs of visitation to the recipient's home program KJP Plus assistance. Another finding was that the physical forgery of the residence had occurred (at the elementary level recipient) but had been handled before the funding was given.

Keywords : Monitoring and evaluation, KJP plus 2018, east jakarta region.

Abstrak

Monitoring dan Evaluasi KJP Plus dilakukan sebagai kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) yang terjalin antara fakultas Ilmu Komunikasi universitas Esa Unggul dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan melakukan verifikasi berupa pendalaman data-data kepada berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan KJP Plus dari Tingkat SD, SMP, SMA, hingga lingkungan tempat tinggal siswa/i yang bersangkutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan desain survei dengan tujuan deskriptif dan observasi non partisipasi melalui wawancara, dengan teknik sampling, *stratified random sampling* dari populasi KJP Plus di beberapa wilayah Jakarta Timur dari masing-masing *Stakeholder* (pihak yang berwenang/terkait) yakni sebanyak 6 orang yang terdiri dari : siswa/i, wali kelas, kepala sekolah, operator KJP Plus, wali murid dan RT. Hasil yang diperoleh bahwa program penyaluran ini telah tepat sasaran kepada penerimanya, dengan catatan berupa tidak adanya peningkatan prestasi bagi siswa/i penerima, kurangnya tenaga khusus program KJP Plus bagi pihak sekolah, belum tersedianya *scanner* serta terbebannya sekolah dengan biaya operasional visitasi ke rumah penerima program bantuan KJP Plus. Temuan lainnya terdapat upaya pemalsuan fisik tempat tinggal sempat terjadi (pada penerima tingkat SD) namun telah tertangani sebelum pemberian dana.

Kata kunci : Monitoring dan evaluasi, KJP plus 2018, wilayah jakarta timur.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi penerus bangsa. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan yang layak kepada semua lapisan masyarakat.

Berbagai perubahan yang terjadi di berbagai lini kehidupan saat ini, terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dengan kemudahan aksesibilitas dan kenyamanan serta murahnya biaya atas pengetahuan itu haruslah menjadi perhatian banyak pihak.

Beradaptasi dengan perubahan ini, bukan hanya kepentingan bagi institusi pendidikan tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan yakni pemerintah sebagai pembuat kebijakan, lembaga penyelenggara pendidikan, hingga peserta didik termasuk orang tua/wali murid.

Para orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah di tingkat TK hingga SMA/K tentu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan sekolah, ditambah kondisi tiap keluarga tentu tidak sama, ada keluarga yang tergolong tidak mampu hingga keluarga yang mampu yang berdomisili di Jakarta, terkait dengan hal ini yang terpenting yakni bagaimana kebutuhan

dasar untuk pendidikan bagi anaknya seperti tas sekolah, sepatu hingga baju sekolah, hingga kebutuhan berupa buku dan alat tulis dapat tersedia dengan layak.

Menyadari kebutuhan pendidikan itu sangatlah penting bagi generasi muda untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia menjadi bangsa yang cerdas serta Negara yang maju serta dapat bersaing di kancah internasional, Pemerintah DKI Jakarta melaksanakan suatu kegiatan berupa bantuan program pendidikan melalui KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar) bagi anak-anak yang kurang mampu dan tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah dengan tujuan mereka dapat menuntaskan pendidikannya secara berjenjang hingga tuntas dengan minimal berpendidikan akhir jenjang Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP) Plus sebagai salah satu program subsidi pendidikan memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu di kota Jakarta. Setiap 6 bulan, siswa atau siswi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA akan diberikan bantuan pendidikan melalui semacam kartu ATM yaitu uang tunai sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Kartu berbentuk ATM ini bisa digunakan oleh siswa untuk mengambil uang tunai kapanpun mereka butuhkan. Namun, sistem pemberian uang tunai seperti ini rentan disalahgunakan siswa untuk kepentingan lain di luar kepentingan pendidikan. Selain itu, dugaan terhadap pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang salah sasaran juga merupakan isu yang terus dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta, guna meningkatkan program subsidi pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ini diharapkan dapat membantu pihak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sehingga dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan dana KJP Plus dan lebih tepat sasaran dalam menentukan Penerima KJP Plus.

Lingkup dan Lokasi Program Pengabdian Pada Masyarakat

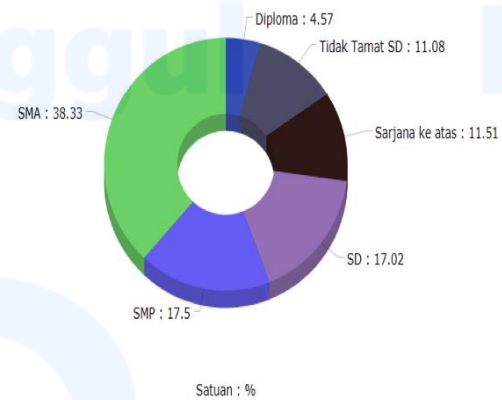
Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Pendanaan KJP Plus

Berikut tabel alokasi besaran dana yang diberikan dalam program KJP Plus

Tabel 1
Alokasi Dana KJP Plus

Tingkatan	Nominal Tarik Tunai	Nominal Deposit
SD Sederajat dan PKBM	Rp. 150.000	Rp. 100.000
SMP Sederajat	Rp. 150.000	Rp. 150.000
SMA Sederajat	Rp. 200.000	Rp. 220.000
SMK Sederajat	Rp. 200.000	Rp. 250.000



Gambar 1

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta

Sumber : Badan Pusat Statistik Databoks.co.id 2018

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) ini dilaksanakan dengan beberapa metode, berupa observasi non partisipan, melakukan wawancara hingga mengajukan permohonan permintaan data sekunder berupa berkas keikutsertaan program KJP Plus berupa kartu peserta KJP Plus. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berinteraksi langsung kepada siswa/i, wali kelas, kepala sekolah, operator KJP Plus, wali murid dan RT. Berikut metode pelaksanaannya, diantaranya :

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para pihak yang terkait langsung program KJP Plus.
2. Observasi juga digunakan untuk mendukung kegiatan memperoleh data dari wawancara dimana observasi yang dilakukan bersifat observasi non partisipan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung awal Oktober hingga Desember 2018 yang berlokasi di beberapa wilayah Jakarta Timur. Berikut Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KJP Plus wilayah Jakarta Timur.

Tabel 2

Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KJP Plus

No.	Tahap kegiatan	Nama Kegiatan	Okt '18			Nov '18			Des '18					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahapan persiapan	Persiapan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat												
		Identifikasi data peserta program KJP Plus												
		Pembagian kelompok dan Wilayah Monitoring dan Evaluasi												
2	Tahapan Pelaksanaan	Persiapan Teknis Monitoring & evaluasi KJP Plus												
		Survey & Wawancara SDN/SDS/MI												
		Survey & Wawancara SMPN/SMPs & MTS												
		Survey & Wawancara SMAN/SMAS & MA												
		Evaluasi Kegiatan, lapangsan Monitoring dan Evaluasi KJP Plus												

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan di mulai dengan mengidentifikasi beberapa strata pendidikan beserta identitas sekolah. Data subjek KJP Plus sebagai berikut :

1. Tingkat Sekolah Dasar

- SDN 09 :
Jumlah Siswa/i 200
Penerima 168
- SDN 11 :
Jumlah Siswa/i 168
Penerima 120
- SD Muhammadiyah 23 :
Jumlah Siswa/i 95
Penerima 61

2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama

- SMP Nurul iman :
Jumlah Siswa/I 416
Penerima 208
- SMP N 07 :
Jumlah Siswa/I 839
Penerima 422
- MTs N 16 :
Jumlah Siswa/I 210
Penerima 83

3. Tingkat Sekolah Menengah Atas

- SMA Muhammadiyah 12 :
Jumlah Siswa/I 369
Penerima 116
- SMA N 22 :
jumlah Siswa/I 878
Penerima 252
- MA AL- Kenaniyyah :
Jumlah Siswa/I 172
Penerima 58

Tahap selanjutnya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber pada strata pendidikan SD hingga SMA berikut wawancara yang dilakukan (hanya menyajikan data 3 tingkatan sekolah sebagai sampel hasil).

Tingkat Sekolah Dasar (SDN 09)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah, didapatkan data jumlah murid yang menerima KJP Plus sebanyak 156 murid.

Setiap siswa boleh mengajukan KJP Plus tetapi sistem yang akan menentukan valid atau tidak.

Menurut kepala sekolah, faktor penghambat dalam pengurusan KJP Plus adalah Kekurangan SDM, Proses Pendataan administrasi yang masih manual dan tidak disediakannya alat bantu seperti scanner untuk beberapa sekolah .

Bahkan terkait, dengan pelayanan KJP plus, Wali kelas bahkan Kepala Sekolah ikut terjun langsung dalam pendataan dan harus meninggalkan jam mengajar.

Jika ada yang melakukan penyalahgunaan KJP Plus, akan dilakukan pemblokiran terhadap siswa tersebut.

Prosedur didalam mendapatkan KJP Plus adalah, Siswa mengajukan, dan membawa sukut dari RT, SKTM, SPTJM, lalu pihak sekolah melakukan visitasi.

Kreteria Siswa / I yang berhak untuk mendapatkan KJP Plus memang berasal dari keluarga tidak mampu, dan dilihat dari keadaan rumah pada saat visitasi dan keterangan jumlah income di kartu keluarga.

Kepala Sekolah ikut mengawasi berjalannya proses program KJP Plus.



Gambar 2
Wawancara Pihak SDN 09

a. Wali Kelas dan Petugas Tata Usaha

Dalam menentukan siswa yang berhak mendapatkan KJP Plus, pihak sekolah (wali kelas) melakukan Visitasi apakah layak atau tidak dan mengambil beberapa foto keadaan rumah sebagai bukti. Para guru juga melakukan sosialisasi untuk memberitahukan bahwa dana KJP hanya untuk diperbolehkan membeli keperluan sekolah, seperti : alat tulis, sepatu, susu. Kami juga melakukan evaluasi melalui tetangga yang menginformasikan apabila terdapat kebohongan yang dilakukan oleh si penerima.

Tugas guru dalam program KJP Plus mendata siswa yang berhak menerima, meminta siswa untuk membawa surat pengantar RT, SPTJM, SKTM, dan melakukan visitasi ke rumah siswa yang bersangkutan.

Jika ada yang menyalahgunakan KJP Plus pihak sekolah akan melakukan pemblokiran KJP Plus terhadap siswa tersebut, dan melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut.

Banyak siswa/I yang merasa terbantu dan termotivasi untuk rajin belajar dan berprestasi.

b. Wali Murid Muhammad Habibi "Ibu Siti Nurfitriah"

M Habibi, di beritahkan kepada pinak sekolah untuk mengisi formulir tentang kjp Plus untuk siswa yang tidak mampu.

Dana yang diterima oleh siswa pemegang KJP plus Rp. 250.000 dan untuk KJP yang lama Rp. 200.000 itu di Terima dalam satu bulan dan hanya bisa di tarik Tunai setiap Bulannya Rp.100.000.

Dana KJP Plus tersebut pernah digunakan untuk beberapa keperluan di luar keperluan sekolah untuk keluarga kami. Untuk mendapatkan KJP Plus tidak terlalu rumit berbeda dengan KJP yang pertama. Ada Proses Perpanjangan KJP Plus per 6 bulan.

Persyaratan untuk mendapatkan KJP plus adalah Surat keterangan Miskin atau KTM, dan Biodata orang tua lengkap dan mengisi formulir dari sekolah dan biasanya ada tim suvey yang mendatangi ke rumah, melakukan foto – foto didalam dan d luar rumah kami.

Pemanfaatan dana KJP Plus Untuk Keperluan sekolah, seperti pakaian, buku, Pensil dan makanan yang bergizi.

c. Siswa

Saya menerima KJP Plus dari kelas 1 SD menerima KJP dan sudah diganti juga menjadi KJP Plus. Jumlah dana yang diterima adalah, dana Tarik Tunai Rp100.000 dan yang deposit Rp. 150.000. Uang tersebut digunakan Untuk membeli sepatu, kebutuhan afektif mendasar sekolah, alat tulis, dan

sembako Setelah menerima (uang) KJP Plus saya menjadi lebih semangat sekolah.

d. Ketua RT dari Keyzha Siswi SDN 09

Ketua RT tahu bahwa Program KJP plus adalah bantuan pendidikan. Setahu saya penambahan uang transportasi Rp.100.000,- bisa diambil secara *cash*.

Pihak RT dan RW tidak berhak menentukan Warga yang mendapat KJP Plus, karena disurvei oleh pihak sekolah. Kebetulan anak saya dapat KJP dan kondisi rumah difoto.

Belum Semua warga yang berhak dapat KJP plus. Ada sebagian yang tidak disurvei, ada yang warga mampu malah dapat KJP.

Dalam mengurus KJP plus Tidak ada faktor penghambat dari Pihak RT, ada contoh di SDN 09 Pisangan Baru dari Pihak Sekolah tidak keluar KJPnya sudah Follow Up Pihak Sekolah tetapi lambat penanganannya. Tugas RT/RW dalam program KJP Plus Membuat atau Membantu Warga untuk membuat surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP Nurul Iman)

a. Kepala Sekolah Bpk. Achmad Yani S.pd

Siswa/i yang menerima KJP plus dari kelas 7, 8 dan 9 terdiri 102 siswa/i yang menerima KJP plus. Dari total 56 siswa/i.

Kami dari pihak sekolah melakukan visitasi dari data siswa/I yang berhak menerima KJP plus. Dilihat dari finansial keluarga, status siswa/siswi, pekerjaan orang tua, dan status tempat tinggal.

Faktor Penghambat dalam mengurus KJP Plus adalah, orang tua siswa/i telat mengirim persyaratan dan formulir, Pencairan dana kjp plus terkadang telat.



Gambar 3
Wawancara Pihak SMP Nurul Huda

Apabila ada yang menyalahgunakan dana dari KJP Plus akan kami cabut dan blacklist.

Prosedur didalam mendapatkan KJP plus, orang tua wajib memberikan persyaratan pendaftaran KJP Plus, verifikasi data, dan persetujuan dari kepala sekolah.

Dokumen atau berkas-berkas untuk mengurus KJP Plus adalah Akta murid, SKTM murid, dan data orang tua, Lalu KK dan Bukti rekening listrik. Surat Permohonan Sebagai penerima KJP Plus

b. Wali Kelas atau Petugas Tata Usaha

Untuk menentukan siswa yang berhak mendapatkan KJP Plus, kami kumpulkan persyaratan penerima KJP Plus, Verifikasi data, Survey dan wawancara ke tempat tinggal, Melporkan kepada kepala sekolah

Tugas guru dalam program KJP Plus Guru mengawasi cara menggunakan uang KJP Plus dengan benar dan melakukan Survey yang di lakukan 3 kali dalam 6 bulan

Menurut para guru di sekolah, Program KJP Plus dapat membantu pembayaran spp dan kebutuhan sekolah

c. Ibu Siti Rohayati Wali Siswa dari Devi Krisdiyanti

Dewi K, bisa terpilih mendapatkan KJP Plus karena diusulkan dan di beritahu dari pihak sekolah. Dana yang diterima oleh siswa pemegang KJP plus Rp. 280.000 dan Rp.180.000 nya Untuk bayar SPP.

Dana tersebut pernah digunakan untuk keperluan di luar sekolah, yaitu untuk keperluan keluarga, kalau memang benar – benar tidak ada uang. Hal ini karena saya sangat susah dalam bidang ekonomi.

Proses untuk mendapatkan KJP tidak terlalu sulit. Lama proses untuk mendapatkan KJP Plus kurang lebih 3 Bulan. Persaratan untuk mendapatkan KJP Plus, isi Formulir lengkap, KTP, KK, Foto Rumah SKTM dari RT/RW langsung ke Sekolah.

Untuk mendapatkan KJP Plus ada tim suvey yang mendatangi ke rumah Bapak/Ibu yaitu wali kelasnya yang datang ke rumah.

Manfaat dari KJP Plus untuk SPP keperluan sekolah, membeli sepatu, seragam dan sembako.



Gambar 4
Dengan Wali Murid Nurul Huda

d. Siswa “ Devi Krisdiyanti “

Menerima KJP Plus sejak Kelas 8. Nominal yang diterima adalah Rp 280.000. Uang tersebut digunakan untuk SPP keperluan sekolah, membeli sepatu, seragam. Dana tersebut dirasa cukup untuk memenuhi keperluan sekolah dan dapat meningkatkan hasil belajar

e. Bpk. Mudiarto Ketua RT dari Devi Krisdiyanti SMP Swasta Nurul Iman

Bapak mudiarto mengetahui bahwa KJP Plus adalah Program pemerintah untuk pendidikan dan meringankan biaya sekolah. Untuk menentukan warganya mendapat KJP Plus, biasanya Warga Membawa Surat dari pihak Sekolah sebagai persyaratan pembuatan SKTM.

Prosesnya untuk mendapatkan keterangan surat tidak mampu dari RT adlah adanya pengajuan permintaan dari warga dan saya survey melihat keadaannya. Jika memang layak, saya buat surat nya tersebut.

Tugas RT/RW dalam program KJP Plus adalah melayani dan membuat surat SKTM yang dibutuhkan oleh warga, dan survey jika perlu dilakukan.

Tingkat Sekolah Menengah Atas SMA Muhammadiyah 12

a. Kepala Sekolah Bpk. Harsono. MM

Siswa/i yang menerima KJP Plus dari 369 Siswa/i ada 280 siswa/i yang ngajukan tapi yang di terima hanya 116 siswa/i.

Untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima KJP Plus, kami akan turun kelapangan untuk memastikan apakah mereka layak untuk men-dapatkan KJP Plus. Kami juga mengikuti informasi terupdate, dari mulai daftar hingga siswa men-dapatkan KJP Plus.

Faktor Penghambat dalam mengurus KJP plus adalah terlambat, tidak lengkapnya data yang diberikan oleh orang tua ke pihak sekolah.

Sanksi untuk pengguna KJP Plus jika menyalahgunakannya adalah memanggil orang tua, pemberian surat peringatan dan pemutusan KJP Plusnya.

Dokumen atau berkas-berkas untuk mengurus KJP Plus adalah KTP, KK, Foto Rumah SKTM dari RT/RW, rekening Listrik.

b. Wali Kelas dan Petugas Tata Usaha SMA Muhammadiyah 12

Untuk menentukan siswa yang berhak mendapatkan KJP Plus adalah melalui data yang akurat dan survey.

Selain itu, pihak Walikelas dari sekolah Muhammadiyah 12 Terjun langsung ke rumah orang tua Siswa.

Untuk mengingatkan siswa/i tentang bagaimana seharusnya menggunakan dana KJP Plus pihak sekolah mengadakan rapat dengan para orang tua untuk memberitahu, mengingatkan bagaimana mempergunakan KJP Plus dengan baik. Lewat. Kami juga melakukan himbauan dengan menggunakan spanduk.

Tugas guru dalam program KJP Plus adalah memberikan edukasi untuk menggunakan dana itu dengan baik. agar tidak disalah gunakan. Sanksi untuk pengguna kjp Plus jika menyalahgunakannya berupa mencabut program ini dan memblacklistnya .

Dokumen yang harus di persiapkan oleh orang tua murid untuk mendapatkan KJPPlus KTP, KK, Foto Rumah SKTM dari RT/RW, rekening Listrik.

c. Ibu Yulia Wali Murid dari Rini Andriani SMA Muhammadiyah 12

Rini A bisa terpilih mendapatkan KJP Plus karena mengajukan KJP Plus dan info dari Sekolah. Dana yang diterima oleh siswa pemegang KJP Plus Sekitar Rp.900.000,-/3bulan. Uangnya untuk keperluan sekolah, membeli sepatu, seragam dan sembako untuk anak, dan tidak pernah digunakan untuk keperluan diluar sekolah.

Apakah proses untuk mendapatkan KJP cukup mudah. Lama proses untuk mendapatkan KJP Plus Sekitar 2 bulan. Persaratan untuk mendapatkan KJP Plus dengan isi Formulir lengkap, KTP, KK, SKTM dari RT/RW dan Rekening Listrik langsung ke Sekolah dan disurvei oleh pihak Sekolah.

Manfaat dari KJP Plus adalah apat bayar spp, membeli peralatan sekolah dan bisa di tukar pangan.

d. Siswa “Nurul Huda Hidayat“

Saya kurang tahu sejak kapan saya menerima KJP Plus, orang tua yang tahu. Jumlah dana KJP Plus Rp 280.000 Perbulan. Dana KJP Plus antara lain digunakan untuk bayar sekolah dan sejak menerima KJP Plus hasil belajar meningkat dan selalu mendapatkan nilai yang bagus

e. Bpk. Benny Kusbianto Ketua RT dari Nurul Huda Hidayat SMA Muhammadiyah 12, Jakarta Timur

Bapak benny tahu apa maksud program KJP Plus, sebagai Program pemerintah untuk biaya pendidikan bagi kalangan menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan.

Untuk menentukan warganya mendapat KJP Plus, Pertama warga yang mendapatkan KJP Plus

nya datang untuk minta surat SKTM , emang itu warga saya dan saya tahu bagaimana keadaan warga saya lalu saya buat SKTM nya dan yang menentukan dapat KJP Plusnya itu kembali lagi yang menentukan dari sekolah.

Sejauh ini warga yang mendapatkan KJP Plus menurut saya sudah tepat sasaran. Prosesnya untuk mendapatkan keterangan surat tidak mampu dari RT adlah dengan membuat surat pernyataan tidak mampu lalu saya buat surat SKTM nya. Saya juga melakukan survey kelokasi rumah warga tersebut.

Tugas RT/RW dalam program KJP Plus adalah melayani dan membuat surat SKTM yang dibutuhkan oleh warga ,dan survey jika perlu dilakukan.

Kesimpulan

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi KJP Plus wilayah Jakarta Timur dapat kami berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi KJP Plus yang di ambil secara random sampling pada wilayah Jakarta Timur sudah sesuai dan hampir tepat sasaran bagi siswa/i yang kurang mampu.
2. Peningkatan prestasi di kalangan siswa/i penerima KJP Plus wilayah Jakarta Timur realtif, lebih banyak siswa/i yang bagus secara akademik dan berprestasi bukan dari penerima KJP Plus.
3. Ada pihak sekolah yang merasa terbebani karena tidak adanya SDM yang menangani, biaya transportasi guna visitasi ke rumah calon siswa penerima dan kurangnya perangkat seperti scanner yang dibutuhkan terkait program KJP Plus Jakarta Timur.
4. Ditemukannya satu kasus pemalsuan data, yakni fisik rumah tinggal (rumah sewaan) dan kemudian dilakukan peninjauan ulang terhadap salah satu penerima KJP Plus di tingkat sekolah dasar dan pemberhentian pemberian dana.
5. Adanya temuan terkait hubungan kedekatan orang tua siswa dengan pejabat lingkungan tempat tinggal (RT), hubungan kerabat/saudara, namun karena pertimbangan syarat terpenuhi hubungan kedekatan tidak dipersoalkan.

Daftar Pustaka

Ardianto, Elvinaro. (2011). *Handbook of Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Badan Pusat Statistik, databoks.co.id.

<http://kjp.jakarta.go.id/kjp2> (diakses 2 Desember 2018, pkl 18.00 bbwi).

[http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?\(diakses 2 Desember 2018, pkl 18.00 bbwi\).](http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?(diakses%20Desember%202018,%20pkl%2018.00%20bbwi).)

<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/monitoringdanevaluasi>
(diakses 2 Desember 2018, pkl 18.00 bbwi).

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-evaluasi/>
(diakses 2 Desember 2018, pkl 18.00 bbwi).

Jefkins, Frank. (1992). *Essentials of Public Relations*, Singapore : Heinemann Asia.

Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial, Perspektif komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Ruslan, Rosady. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo.

Semiawan, Conny, R. (2010). *Meode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta; PT. Gramedia.

Wasesa, Macnamara. (2015). *Strategi Public Relations*, Jakarta: PT. Gramedia.